

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Setelah melakukan kajian literatur dan pengujian mengenai “Pengaruh Kinerja Manajemen terhadap *Good Public Governance (GPG)* Perguruan Tinggi di Jawa Tengah”, ditemukan bahwa kinerja manajemen memiliki pengaruh melalui variabel Pelayanan Akademik (X1), Kepatuhan Regulasi (X2), dan Alokasi Dana (X3). Penerapan *GPG* perguruan tinggi di Jawa Tengah terukur baik, dengan 115 mahasiswa dan *stakeholder* mengakui bahwa Pelayanan Akademik (PA) dan Alokasi Dana (AD) memiliki pengaruh, sedangkan Kepatuhan Regulasi (KR) tidak memiliki pengaruh. Secara keseluruhan, 71,3% variasi *GPG* perguruan tinggi dipengaruhi oleh ketiga variabel ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelayanan akademik memiliki pengaruh terhadap *GPG* perguruan tinggi di Jawa Tengah dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,471 atau 47,1%. Ini menunjukkan bahwa PA yang baik, seperti akses informasi mengenai beasiswa dan program akademik, sangat mendukung tata kelola yang baik. Responden menilai tinggi indikator yang terkait dengan program akademik, namun masih merasa perlu penyesuaian dalam hal kerjasama dengan dunia industri untuk meningkatkan relevansi program.
2. Kepatuhan regulasi tidak memiliki pengaruh terhadap *GPG* perguruan tinggi di Jawa Tengah. Meskipun KR menunjukkan nilai koefisien jalur

positif sebesar 0,156 atau 15,6%, pengaruh ini tidak cukup kuat secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan regulasi penting, namun tidak cukup kuat untuk mendukung *GPG*. Responden mengapresiasi upaya dalam kepatuhan regulasi, tetapi masih meragukan relevansi komitmen terhadap standar nasional.

3. Alokasi dana memiliki pengaruh terhadap *GPG* perguruan tinggi di Jawa Tengah dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,342 atau 34,2%. Transparansi dalam penyaluran dana dan aksesibilitas yang mudah dinilai sangat penting oleh responden. Meskipun demikian, masih terdapat kekhawatiran mengenai cara mendapatkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.
4. Kombinasi dari ketiga variabel ini menunjukkan pengaruh terhadap *GPG* perguruan tinggi di Jawa Tengah dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,833 atau 83,8%. Integrasi PA yang baik, KR, dan AD yang transparan dan tepat sasaran sangat penting dalam mendukung *GPG*. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya kolektif dalam berbagai aspek kinerja manajemen sangat berpengaruh terhadap tata kelola publik.

## 5.2 Implikasi

### 1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur akademik terkait *Good Public Governance (GPG)* perguruan tinggi. Dengan menguji pengaruh tiga variabel kinerja manajemen, yaitu Pelayanan Akademik (PA), Kepatuhan Regulasi (KR), dan Alokasi Dana

(AD), penelitian ini menegaskan pentingnya pengelolaan manajemen yang efektif dalam meningkatkan tata kelola publik. Hasil penelitian mendukung teori bahwa PA dan AD berkontribusi terhadap *GPG* perguruan tinggi, menggarisbawahi bahwa pengelolaan yang baik dalam pelayanan akademik dan pengalokasian dana secara efektif sangat penting untuk mencapai tata kelola publik yang baik.

Meskipun KR tidak menunjukkan pengaruh yang cukup kuat secara statistik, temuan ini memberikan wawasan bahwa regulasi mungkin lebih relevan sebagai faktor moderasi atau dukungan yang memperkuat PA dan AD. Selain itu, temuan yang menunjukkan bahwa 28,7% variasi *GPG* perguruan tinggi dipengaruhi oleh faktor lain yang belum diteliti, menandakan perlunya modifikasi atau pengembangan teori baru untuk mencakup variabel yang mungkin relevan. Temuan ini memberikan validasi empiris terhadap model teoretis yang digunakan dan membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi faktor-faktor tambahan yang dapat mempengaruhi *GPG* perguruan tinggi.

## 2. Implikasi Praktis

### a. Bagi Pemangku Kepentingan

Berdasarkan temuan penelitian, memberikan dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan tata kelola publik perguruan tinggi, baik di Jawa Tengah maupun di wilayah lain. Pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga pengawas, dan organisasi terkait, dapat menggunakan temuan ini untuk memprioritaskan

peningkatan pelayanan akademik, penguatan regulasi, dan alokasi dana yang transparan. Kebijakan berbasis bukti yang berfokus pada efisiensi penggunaan sumber daya dan relevansi pelayanan akademik dapat mendorong tata kelola yang lebih baik di sektor pendidikan tinggi.

b. Bagi Badan Pengelola Perguruan Tinggi

Berdasarkan temuan penelitian, memberikan dasar bagi pengelola perguruan tinggi, penelitian ini dapat digunakan untuk merancang strategi pengelolaan yang lebih efektif dan efisien. Temuan bahwa pelayanan akademik dan alokasi dana berkontribusi terhadap tata kelola publik yang baik menegaskan pentingnya investasi dalam pengembangan program akademik dan pengelolaan dana yang akuntabel. Pengelola perguruan tinggi juga disarankan untuk memperkuat implementasi sistem monitoring dan evaluasi dalam manajemen operasional, sehingga tata kelola dapat lebih transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

c. Bagi Mahasiswa

Berdasarkan temuan penelitian, memberikan wawasan bagi mahasiswa dalam memahami praktik manajemen yang efektif di perguruan tinggi. Mahasiswa dapat mengidentifikasi area di mana pelayanan akademik berjalan dengan baik, seperti akses terhadap beasiswa, program pertukaran mahasiswa, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Selain itu, penelitian ini membantu mahasiswa memahami pentingnya tata kelola yang baik dalam menciptakan lingkungan

pendidikan yang transparan, adil, dan efisien, sehingga mereka lebih siap untuk berkontribusi di dunia kerja.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang mempengaruhi konseptual, metodologi, dan pengumpulan data. Keterbatasan meliputi:

#### 1. Keterbatasan Literatur

Penelitian ini menghadapi tantangan dalam mendapatkan literatur yang relevan karena variabel yang diteliti, seperti Pelayanan Akademik, Kepatuhan Regulasi, dan Alokasi Dana dalam konteks *Good Public Governance (GPG)*, mungkin belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya. Hal ini membatasi kemampuan penulis dalam mengembangkan kerangka konseptual yang komprehensif dan mempengaruhi interpretasi temuan penelitian.

#### 2. Keterbatasan dalam Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data menghadapi beberapa kendala, termasuk rendahnya responsivitas pada penyebaran kuesioner secara *online*, terutama dalam lembaga pemerintah dan pimpinan wilayah. Akibatnya, peneliti terpaksa melakukan penyebaran kuesioner secara *offline* ke-19 lokasi di wilayah Jawa Tengah. Meskipun upaya ini meningkatkan tingkat *respons*, keterbatasan dalam waktu dan sumber daya tetap mempengaruhi cakupan dan kedalaman data yang diperoleh.

#### 3. Keterbatasan Variabel

Penelitian ini fokus pada tiga variabel utama: PA, KR, dan AD. Namun, terdapat kemungkinan bahwa faktor-faktor lain yang mungkin

mempengaruhi *GPG*, seperti teknologi informasi atau faktor eksternal, tidak diperhitungkan dalam model ini. Hal ini menyisakan 28,7% variasi dalam *GPG* yang belum terjelaskan, menunjukkan perlunya eksplorasi variabel tambahan dalam penelitian mendatang.

#### 5.4 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya serta bagi perguruan tinggi dan pihak terkait, sebagai berikut:

##### 1. Ekspansi Literatur

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperkuat dasar teoretis dengan memasukkan literatur internasional yang relevan terkait dengan variabel Pelayanan Akademik (PA), Kepatuhan Regulasi (KR), dan Alokasi Dana (AD) dalam konteks *Good Public Governance (GPG)*. Integrasi temuan dari penelitian-penelitian internasional tidak hanya dapat memperluas pemahaman teoretis tetapi juga memberikan konteks empiris yang lebih komprehensif, terutama dalam memahami perbedaan implementasi tata kelola publik di berbagai negara. Langkah ini juga dapat mendukung pengembangan kerangka konseptual yang lebih solid dan relevan untuk konteks perguruan tinggi di Indonesia.

Bagi Pengelola Perguruan Tinggi, Pemerintah, dan *Stakeholder*, penting untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap data dan literatur yang berkaitan dengan tata kelola publik perguruan tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui

pengembangan pusat studi, repositori, atau pustaka digital berbasis teknologi informasi yang dapat diakses oleh akademisi, mahasiswa, dan pengambil kebijakan. Dengan tersedianya sumber daya yang lebih baik, semua pihak dapat berkontribusi pada penguatan literatur dan praktik tata kelola yang berbasis bukti ilmiah, yang pada akhirnya akan memperbaiki mutu pengelolaan perguruan tinggi secara keseluruhan.

## 2. Pengumpulan Data *Mixed-Method*

Penelitian mendatang diharapkan dapat mempertimbangkan penggunaan metode campuran (*mixed-method*) yang menggabungkan analisis kuantitatif dengan wawancara kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali persepsi individu dan kelompok terkait *Good Public Governance (GPG)* secara lebih mendalam dan menyeluruh. Dengan metode ini, tidak hanya hubungan antar variabel yang dapat dideskripsikan secara rinci, tetapi juga berbagai dinamika sosial, kultural, dan kelembagaan yang memengaruhi implementasi *GPG* dapat diidentifikasi dengan lebih akurat.

Bagi Pengelola Perguruan Tinggi, Pemerintah, dan Stakeholder, kolaborasi dalam pengumpulan data dapat ditingkatkan melalui pelibatan aktif dalam survei, wawancara, maupun diskusi terfokus (*focus group discussions*). Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan forum diskusi atau lokakarya yang melibatkan mahasiswa, dosen, alumni, dan pihak eksternal untuk mendapatkan masukan strategis terkait tata kelola publik. Pemerintah dan stakeholder lainnya dapat mendukung proses ini dengan memberikan

panduan teknis, akses data yang relevan, atau pelatihan khusus bagi peneliti untuk memastikan data yang dikumpulkan valid dan berkualitas tinggi.

3. Pengaruh Variabel Tambahan terhadap *Good Public Governance (GPG)*

Penelitian ini menunjukkan bahwa 28,7% variasi dalam *GPG* belum dapat dijelaskan oleh variabel PA, KR, dan AD. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk mengeksplorasi variabel tambahan yang mungkin memengaruhi *GPG*, seperti teknologi informasi, inovasi pendidikan, atau budaya organisasi. Penambahan variabel moderasi, seperti tingkat partisipasi *stakeholder* juga dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang berkontribusi secara terhadap pencapaian *GPG* perguruan tinggi.

Bagi Pengelola Perguruan Tinggi, Pemerintah, dan *Stakeholder*, perlu adanya perhatian pada inovasi kebijakan dan teknologi yang mendukung tata kelola publik perguruan tinggi. Pengembangan infrastruktur digital yang terintegrasi, seperti sistem manajemen berbasis teknologi informasi atau platform transparansi anggaran, dapat meningkatkan efisiensi, partisipasi, dan transparansi dalam tata kelola. Selain itu, pemerintah dapat mendorong program inovasi pendidikan untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan industri, serta menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih adaptif terhadap tantangan global. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola publik secara menyeluruh di lingkungan perguruan tinggi.